

**PENGUKURAN KINERJA ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN
BELANJA DENGAN MENGGUNAKAN METODE
VALUE FOR MONEY PADA DINAS PU. BINA
MARGA KABUPATEN MUARA ENIM**

SKRIPSI



Nama : MUCHAMAD RIZKI

NIM : 22.2010.135

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2014**

SKRIPSI

**PENGUKURAN KINERJA ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN
BELANJA DENGAN MENGGUNAKAN METODE
VALUE FOR MONEY PADA DINAS PU. BINA
MARGA KABUPATEN MUARA ENIM**

**Diajukan Untuk Menyusun Skripsi Pada
Program Strata Satu Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Palembang**



Nama : MUCHAMAD RIZKI

NIM : 22.2010.135

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2014**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUCHAMAD RIZKI


NIM : 22 2010 135

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, Juni 2014

Penulis


METERAI
TEMPEL
PALANGKARAYA
70461101F454489469
6000 DJP
(Muchamad Rizki)

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang**

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

**Judul Skripsi : Pengukuran Kinerja Atas Pelaksanaan
Anggaran Belanja Dengan
Menggunakan Metode *Value For Money*
Pada Dinas PU. Bina Marga Kabupaten
Muara Enim.**

Nama : Muchamad Rizki
NIM : 222010135
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

**Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal.....**

Pembimbing Skripsi



Mizan., S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN : 0206047101

Palembang, Maret 2014

a.n Dekan

Ketua Program Studi Akuntansi



Rosalina Ghozali, S.E., M.Si, Ak
NIDN : 0228115802/021960

MOTTO DAN PERSEMBAHAAN

MOTTO

- ❖ *“ Hidup adalah anugerah terindah yang diberikan oleh ALLAH SWT, jadi pergunakanlah sisa- sisa hidupmu untuk hal yang baik sebagai rasa syukur kita kepadanya ”*
- ❖ *“ Jika anda menginginkan sesuatu yang besar maka buatlah sesuatu yang besar pula ”*

(MUCHAMAD RIZKI)

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ❖ *Ayah dan Ibu*
- ❖ *Saudara- Saudaraku*
- ❖ *Sahabat-sahabatku Semuanya*



PRAKATA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat-Nya, kemudian tak lupa shalawat beserta salam kepada Rasulullah SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Pengkukuran Kinerja Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Dengan Menggunakan Metode *Value For Money* Pada Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim” dengan penuh usaha dan do’a untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana Strata 1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulisan laporan ini tentu tidak akan selesai tanpa dorongan dan dukungan banyak pihak. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih terutama kepada kedua orang tua yang do’a dan bantuannya memiliki makna besar dalam proses penulisan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mizan., S.E., M.Si., Ak., CA yang telah membimbing dan memberikan masukan guna penyelesaian skripsi ini. Selain itu ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak M. Idris, S.E, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Abid Djazuli, S.E, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang beserta seluruh dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Ibu Rosalina Ghazali, S.E, Ak., M.Si dan Ibu Welly S.E. M.Si selaku Ketua Program dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Muhammad Fahmi, S.E., M.Si selaku Pembimbing Akademik saya.
5. Kepala Dinas PU. Bina Marga dan Kasubbag Keuangan beserta Staf- staf tempat penulis melakukan penelitian.
6. Kepada keluarga besar saya Ibu saya Ida Yuhartini dan Ayah saya Kamaluddin serta Saudara kandung saya Brigadir. Paisal Amin. S.H., Wulan Damayanti dan Ira Ulfa Yunika yang selalu memotivasi saya.
7. Sahabat- sahabat seperjuanganku Rizky Puspita Sari. S.E., Dewi Indah Permata Sari. S.E., Akhta Saputra S.Pi., Desri Harmiko, dan Gustiawan yang selalu memberikanku semangat.
8. Dan orang – orang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima Kasih

Semoga Allah SWT membalas budi baik untuk seluruh bantuan yang diberikan guna menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari, meskipun banyak usaha telah penulis lakukan, akan tetapi laporan ini masih jauh dari sempurna.

Meskipun demikian mudah-mudahan dari laporan penelitian ini tetap ada manfaat yang dapat diperoleh. Amin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Agustus 2014

Penulis



Muchamad Rizki

B. Landasan Teori	9
1. Definisi Kinerja	9
2. Pengukuran Kinerja Sektor Publik	10
3. Indikator Kinerja Pemerintah	10
4. Siklus Pengukuran Kinerja	12
5. Tujuan Sistem Pengukuran Kinerja	14
6. Manfaat Sistem Pengukuran Kinerja	15
7. Prinsip- Prinsip Pemilihan Ukuran Kinerja	15
8. Metode 3E (<i>Value For Money</i>).....	16
9. Teknik Pengukuran Kinerja.....	18
10. Anggaran Sektor Publik.....	20
11. Belanja	22
12. Anggaran.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Jenis Penelitian	23
B. Lokasi Penelitian.....	24
C. Overasional Variabel	24
D. Data Yang Diperlukan.....	26
E. Teknik Pengumpulan Data.....	26
F. Analisis Data Dan Teknik Analisis	27

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
A. Hasil Penelitian.....	29
1. Gambaran Umum Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim	29
2. Visi dan Misi Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim	29
3. Struktur Organisasi	30
a. Susunan Organisasi	30
b. Tugas dan Fungsi	33
B. Pembahasan	50
1. Pengukuran Ekonomis	50
2. Pengukuran Efisiensi	57
3. Pengukuran Efektivitas	60
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	63
A. Simpulan.....	63
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN- LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Pada Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim Tahun 2010- 2012	4
Tabel I.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pada Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim Tahun 2010- 2012	5
Tabel I.3 Rincian Realisasi Biaya Operasional Pada Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim	5
Tabel III.1 Operasional Variabel.....	25
Tabel IV.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Pada Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim Tahun 2010- 2012.....	49
Tabel IV.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pada Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim Tahun 2010- 2012.....	49
Tabel IV.3 Rincian Realisasi Biaya Operasional Pada Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim.....	50
Tabel IV.4 Hasil Perhitungan Tingkat Ekonomis.....	56
Tabel IV.5 Hasil Perhitungan Tingkat Efisiensi.....	59
Tabel IV.6 Hasil Perhitungan Tingkat Efektivitas.....	61

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Siklus Pengukuran Kinerja.....	14
Gambar II.2 Konsep 3E	17

ABSTRAK

Muchamad Rizki/ 222010135/ 2014/ Pengukuran Kinerja Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Dengan Menggunakan Metode *Value For Money* Pada Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim/ Akuntansi Sektor Publik.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Kinerja Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim jika diukur Dengan Menggunakan Metode *Value For Money*. Tujuannya adalah untuk mengetahui kinerja atas pelaksanaan anggaran belanja dengan menggunakan metode *value for Money* Pada Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, tempat penelitian Pada Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim, data yang digunakan adalah data primer dan skunder, teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi analisis data yaitu kualitatif.

Berdasarkan hasil analisis yang diuraikan pada bab IV mengenai kinerja anggaran belanja pegawai tahun 2010- 2012 pada Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim, tidak ekonomis. Sedangkan tahun 2012 berjalan ekonomis, dari segi efisiensi dari tahun 2010- 2012 tidak efisien dan dari segi efektivitas tahun 2010- 2011 tidak efektif tetapi tahun 2012 efektif.

Kata kunci: Pengukuran Kinerja dan *Value For Money*.

ABSTRACT

Muchamad Rizki / 222010135/2014 / The performance assessment towards the budget implementation of PU. Bina Marga public works agency by using value for money method.

The problem of this study was how the performance towards the budget implementation of Bina Marga muara enim public works agency by using value for money method was the objective of this study was to find out the performance towards the budget implementation of Bina Marga muara enim public works agency by using value for money method.

This study used descriptive research. It was conducted at Bina Marga Muara Enim public works agency the data used in this study were primary and secondary data. Techniques for collecting the data were using interviews and documentation. The data analysis was qualitative.

Based on the analysis, it showed that the budget implementation of Bina Marga Muara Enim public works agency from 2010 to 2012 was not economical. Meanwhile it was economical in 2012, based on the efficiency aspect from 2010 to 2012, the budget implementation was not efficient. In addition, based on the effective ness aspect from 2010 to 2011, budget implementation was not effective, but it was in 2012.

Keywords: Performance Measurement and value for money.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dinamika perkembangan lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal sangat berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam pencapaian kinerja sebagaimana yang diharapkan. Dalam rangka meningkatkan kinerja, diperlukan serangkaian proses manajemen kinerja yang dimulai dari merencanakan kinerja hingga mengevaluasi kinerja. Pemerintah daerah harus melakukan pengoptimalisasian anggaran yang dilakukan secara ekonomis, efisiensi, efektivitas, dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melalui suatu pengukuran kinerja, keberhasilan suatu instansi pemerintah akan lebih dilihat dari kemampuan instansi tersebut berdasarkan sumber daya yang dikelolanya untuk mencapai hasil sesuai dengan rencana yang telah dituangkan dalam perencanaan strategis yang dapat memajukan perekonomian. Dengan memajukan perekonomian maka akan menciptakan efisiensi, dan peningkatan aspek finansial daerah (pendapatan perkapita, serta pertumbuhan sektor industri dan lain- lain). Dengan adanya pengukuran kinerja secara komprehensif yang meliputi indikator sumber daya yang digunakan, keluaran hasil yang bermanfaat yang benar- benar dirasakan oleh masyarakat serta memperhitungkan dampak langsung maupun tidak langsung dari setiap

kebijakan atau program yang dilaksanakan yang dapat terwujudnya akuntabilitas kinerja.

Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga- lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal. Tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintah, pembangunan, pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dilihat apakah pemerintahan daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Desentralisasi yang melahirkan kewenangan besar bagi pemerintah daerah mengelola sumber daya publik di daerahnya masing- masing, desentralisasi juga memberikan tanggungjawab daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah masing- masing. Upaya peningkatan daerah ini sering dilakukan dengan perluasan dan penjaringan para wajib pajak, penerimaan dari pajak dan retribusi ini merupakan pendapatan yang cukup signifikan dalam meningkatkan penerimaan daerah. Salah satu alat ukur menganalisis mengukur kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah adalah dengan menggunakan metode *value for money* yang memiliki kriteria pokok yang mendasari pelaksanaan manajemen publik sekarang ini yang ekonomis, efisiensi, dan efektivitas atau yang dikenal dengan konsep 3E.

Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim merupakan salah satu instansi pemerintah yang bergerak dalam sektor publik dalam bidang jasa dan konstruksi. Organisasi sektor publik sedang mengalami tekanan untuk lebih efisiensi, memperhitungkan biaya ekonomi dan dampak negatif dari aktivitas yang dilakukan karena akan berdampak pada pengeluaran yang cukup besar dalam anggaran belanja rutin.

Pengukuran kinerja pada Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim hanya membandingkan anggaran belanja dan realisasinya, sehingga apabila realisasi biaya lebih besar dari pada anggaran yang ditetapkan maka dinyatakan tidak berhasil, sebaliknya apabila realisasi belanja lebih kecil dari pada anggaran yang telah ditetapkan maka dinyatakan berhasil. Fenomena yang terjadi pada dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim yaitu kinerja pada instansi tersebut dalam pelaksanaan anggaran belanja yang diberikan pemerintah pusat kurang maksimal, maksudnya anggaran masih kurang efektif, efisien, dan ekonomis, itu dilihat dari data yang ada.

Tabel I.1
Anggaran dan Realisasi Belanja Pada Dinas PU. Bina Marga
Kabupaten Muara Enim
Tahun 2010- 2012

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang
Tahun 2010			
Belanja Pegawai	3.119.252.099	3.288.928.693	(169.676.594)
Belanja Barang dan Jasa	2.362.464.980	1.723.086.892	639.378.088
Belanja Modal	127.270.000.000	122.289.945.158	4.980.054.842
Total	132.751.717.079	127.301.960.743	5.789.109.524
Tahun 2011			
Belanja Pegawai	3.329.301.973	3.494.609.673	(165.307.700)
Belanja Barang dan Jasa	2.998.827.400	2.517.417.988	481.409.412
Belanja Modal	144.356.097.999	138.415.385.348	5.940.712.651
Total	150.684.227.372	144.424.413.009	6.584.429.763
Tahun 2012			
Belanja Pegawai	4.013.648.122	3.375.350.913	638.297.209
Belanja Barang dan Jasa	5.161.817.069	4.500.014.140	561.802.929
Belanja Modal	245.639.624.975	238.436.721.000	7.202.903.975
Total	254.815.090.166	246.312.086.053	8.403.004.113

Sumber : Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim, 2014

Berdasarkan tabel di atas bahwa anggaran belanja Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim pada tahun 2010, 2011, dan 2012 dilihat secara total keseluruhan mengalami suatu peningkatan. Tetapi kalau dilihat berdasarkan pembagian anggaran belanja yang terdiri dari anggaran belanja pegawai, anggaran belanja barang dan jasa, dan anggaran belanja modal, anggaran belanja pegawai pada tahun 2010 dan 2011 terjadi selisih negatif karena realisasinya melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Sedangkan pada tahun 2012 anggaran belanja pegawai mengalami selisih positif karena realisasinya tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan begitu juga pada anggaran barang dan jasa serta anggaran belanja modal dari tahun 2010- 2012

mengalami selisih positif karena realisasinya tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan.

Tabel I.2
Anggaran dan Realisasi Pendapatan pada Dinas PU. Bina Marga
Kabupaten Muara Enim
Tahun 2010- 2012

Tahun	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang
2010	48.707.109	101.484.780	52.777.671
2011	50.162.060	82.709.480	32.547.420
2012	64.940.870	64.855.560	85.310
Total	163.810.039	249.049.820	85.410.401

Sumber: Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim, 2014

Berdasarkan tabel diatas anggaran pendapatan pada Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim dari tahun 2010- 2012 dilihat dari total keseluruhan mengalami selisih positif karena realisasinya melebihi anggaran yang ditetapkan sedangkan kalau dilihat dari realisasi pertahunnya mengalami penurunan pendapatan.

Tabel I.3
Rincian Realisasi Biaya Operasional pada Dinas PU. Bina Marga
Kabupaten Muara Enim
Tahun 2010- 2012

Tahun	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
2010	186.775.980	95.898.230	90.877.750
2011	197.830.300	121.475.800	76.354.500
2012	465.740.300	461.040.300	4.700.000
Total	580.346.580	678.414.330	171.932.250

Sumber: Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim, 2014

Bedasarkan data yang ada biaya operasional Dinas PU. Bina Marga kabupaten muara enim mengalami selisih positif karena realisasinya tidak melebihi anggaran yang ditetapkan.

Konsep pengukuran kinerja dengan metode *value for money* ini, mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian tentang bagaimana metode *value for money* dalam mengukur kinerja pelaksanaan anggaran belanja pada Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim. Berdasarkan informasi dari bagian keuangan pada instansi tersebut berkaitan dengan anggaran belanja, bahwa kinerjanya masih kurang ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengukuran Kinerja Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Dengan Menggunakan Metode *Value For Money* Pada Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimanakah kinerja atas pelaksanaan anggaran belanja Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim jika diukur dengan metode *value for money*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang dikemukakan diatas yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja atas pelaksanaan anggaran belanja dengan menggunakan metode *value for money* pada Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang di dapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman penulis dalam mengukur kinerja sektor publik melalui pengetahuan penulis yang diperoleh selama dibangku kuliah.

2. Bagi Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim

Sebagai masukan yang positif bagi dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim untuk mengambil kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dinas pemerintahan daerah secara efektif, efisien, ekonomis dalam penyusunan anggaran.

3. Bagi Almamater

Sebagai bahan referensi dan kerangka acuan yang bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
1	Tri Siswi Nugrahani (2007) Analisis Penerapan Konsep <i>Value For Money</i> Pada Pemerintah Daerah Istimewah Yogyakarta.	Hasil penelitian yang dilakukan pemerintah DIY jika diukur dengan metode <i>value for money</i> kinerjanya cukup efektif, efisien, dan ekonomis.	Perbedaannya terletak pada objek penelitian, objek penelitian sebelumnya dilakukan pada Pemerintah Daerah Istimewah Yogyakarta sedangkan penelitian sekarang dilakukan pada Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim. Persamaan dengan penelitian sebelumnya sama- sama meneliti dengan konsep <i>Value For Money</i> .
2	Dian Annisa (2011) Evaluasi Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Kota Makasar Melalui Pendekatan <i>Value For Money</i> .	Hasil penelitian dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Makasar sudah efisien tapi belum efektif karena program tersebut belum dapat memuaskan masyarakat secara maksimal.	Perbedaan terletak pada objek penelitian, objek penelitian sebelumnya dilakukan pada Dinas Kesehatan Kota Makasar sedangkan penelitian sekarang dilakukan pada Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim. Persamaan dengan penelitian sebelumnya sama- sama meneliti dengan konsep <i>Value For Money</i> .
3	Wiwik Setiyawati (2012) Analisis Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan <i>Value For Money</i>	Hasil penelitiannya PT. Pos Palembang secara keseluruhan melakukan kegiatan tidak efektif karena kurangnya perencanaan dalam membuat anggaran	Perbedaan terletak pada objek penelitian, objek penelitian sebelumnya dilakukan pada PT. Pos Palembang sedangkan penelitian sekarang dilakukan pada Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim. Persamaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada

Pada PT. Pos Indonesia (Persero) Palembang.		tujuan penelitiannya untuk mengetahui kinerja dengan konsep <i>Value For Money</i> .
---	--	--

B. Landasan Teori

1. Definisi Kinerja

Menurut Bastian (2006: 274), kinerja adalah gambaran pelaksanaan pencapaian suatu program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Daftar apa yang ingin dicapai tertuang dalam perumusan penskemaan strategi suatu organisasi. Secara umum kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi tersebut harus dapat dicatat. Pengukuran ini tidak hanya dilakukan pada masukan (*input*) program, tetapi juga pada keluaran manfaat, dari program tersebut.

Menurut Mahsun (2006: 25), Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok tersebut mempunyai kriteria keberhasilan ini berupa tujuan- tujuan atau target, kinerja seorang atau organisasi mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya.

2. Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Menurut Mahsun (2006: 25), pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan), hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan, efektif tindakan dalam mencapai tujuan.

3. Indikator Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut mahsun (2006: 77) jenis indikator kinerja pemerintah daerah meliputi:

a. Kelompok masukan (*input*)

adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini mengukur jumlah sumber daya seperti anggaran (dana), sumber daya manusia, peralatan, material, dan masukan lain yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumber daya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategi yang diterapkan. Tolak ukur ini dapat pula digunakan untuk perbandingan dengan lembaga- lembaga relavan.

b. Kelompok proses (*process*)

Dalam indikator proses organisasi merumuskan ukuran kegiatan baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Rambu yang paling dominan dalam proses adalah tingkat efisiensi dalam ekonomis pelaksanaan kegiatan organisasi. Efisiensi berarti besarnya hasil yang diperoleh dengan pemanfaatan jumlah input, sedangkan yang dimaksud dengan ekonomis adalah bahwa suatu kegiatan dilaksanakan lebih murah dibandingkan dengan standar biaya atau waktu yang telah ditentukan untuk itu.

c. Kelompok keluaran (*output*)

adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berwujud maupun tidak berwujud. Indikator-indikator atau tolak ukuran keluaran tingkat digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan dengan membandingkan keluaran instansi dapat menganalisis apakah kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolak ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan terdefinisi dengan baik dan terukur.

d. Indikator hasil (*outcomes*)

Adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah yang mempunyai efek langsung. Pengukuran indikator hasil lebih utama dari sekedar output. Walaupun produk telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu outcomes

kegiatan tersebut telah dicapai. Outcomes menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup banyak pihak. Dengan indikator outcomes organisasi akan dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya output dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak.

e. Indikator manfaat (Benefit)

adalah segala sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator manfaat menggambarkan manfaat yang telah diperoleh dari indikator hasil. Manfaat tersebut baru tampak setelah beberapa waktu kemudian, khususnya dalam jangka menengah dan jangka panjang. Indikator manfaat menunjukkan hal yang diharapkan dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal (tepat lokasi dan waktu).

f. Indikator dampak (*impact*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif.

4. Siklus Pengukuran Kinerja

Menurut Bastian (2006: 281), ada beberapa siklus pengukuran kinerja yaitu:

a. Perencanaan Strategik

Siklus pengukuran kinerja dimulai dengan proses perencanaan strategik, yang berkenaan dengan penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program operasional dan kegiatan atau aktivitas.

b. Penetapan Indikator Kerja

Setelah perumusan strategik instansi atau perusahaan perlu menyusun dan menetapkan ukuran indikator kerja.

c. Pengembangan Sistem Pengukuran Kinerja

Ada tiga kegiatan dalam kegiatan ini. Pertama, harus yakin bahwa mempunyai data yang diperlukan dan dilanjutkan sesuai siklus pengukuran kinerja. Kedua, mengukur kinerja harus mengumpulkan data. Ketiga, menggunakan data pengukuran kinerja yang dihimpun dan hal ini harus dipresentasikan dengan cara yang dapat dimengerti.

d. Penyempurnaan Ukuran

Pada tahap ini pemikiran pada indikator hasil dan indikator dampak menjadi lebih penting dibandingkan pemikiran atas indikator masukan dan keluaran.

e. Pengintegrasian dengan proses manajemen

Pada saat ukuran kerja tersedia tantangan selanjutnya adalah mengintegrasikan pengukuran kinerja dengan proses manajemen.

Gambar II.1
Siklus Pengukuran Kinerja



Sumber: Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar (Bastian,2006:281)

5. Tujuan Sistem Pengukuran Kinerja

Menurut Mardiasmo (2002: 122), tujuan sistem pengukuran kinerja yaitu:

- a. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (*top down and battom up*).
- b. Untuk mengukur kinerja financial dan financial secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi.
- c. Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah serta untuk memotivasi agar tercapainya *good congruence*.

- d. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

6. Manfaat Sistem Pengukuran Kinerja

Menurut Mardiasmo (2002: 122) menyatakan bahwa manfaat pengukuran kinerja adalah:

- a. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang dilakukan untuk menilai kinerja.
- b. Memberikan arah untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
- c. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melalui tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.
- d. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.
- e. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisas.
- f. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan telah dipenuhi.
- g. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
- h. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

7. Prinsip- Prinsip Pemilihan Ukuran Kinerja

Menurut Bastian (2001: 326), pemilihan ukuran kinerja untuk instansi dan perusahaan mempertimbangkan prinsip- prinsip sbb:

- a. Evaluasi lagi ukuran yang ada. Ukuran yang dievaluasi secara rutin, apabila sudah tidak berguna maka alasan terkait dengan kenyamanan manajemen perlu dikemukakan
- b. Mengukur kegiatan yang penting tidak hanya hasil secara keseluruhan.
- c. Mengukur hasil motivasi tim kerja untuk pencapaian tujuan.
- d. Proses pengukuran merupakan perangkat yang terintegrasi
- e. Fokus pengukuran harus melibatkan akuntabilitas publik. Ukuran internal yang umumnya digunakan adalah perbandingan kinerja dari tahun ketahun antar unit seperti visi, departemen, kelompok, dan individu.

8. Metode 3E (*Value For Money*)

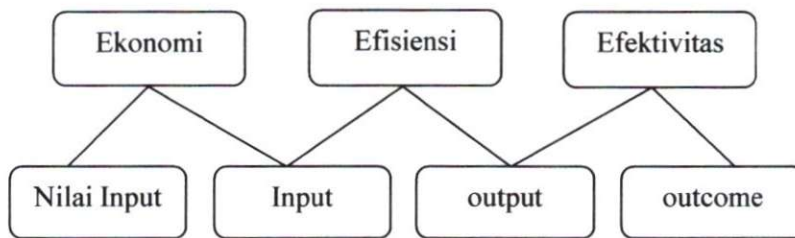
a. Konsep Umum 3E

Tolak ukur dalam anggaran belanja suatu organisasi, baik organisasi yang berorientasi laba (swasta) maupun organisasi nonprofit (sektor publik) adalah konsep 3E yang meliputi penelitian efisiensi, efektivitas, ekonomis. Efisiensi dan efektivitas anggaran belanja merupakan salah satu prinsip utama dalam menyelenggarakan anggaran belanja suatu organisasi sektor publik agar dapat memberikan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal. Indikator kinerja dalam suatu organisasi yang menggambarkan pencapaian tingkat pelayanan pada biaya ekonomis yang terbaik (*economical cost*). Ini berarti unit biaya yang terendah tidak selalu menggambarkan *value for money* (3E) yang terbaik karena dengan biaya yang termurah tidak selalu merupakan yang terbaik.

Secara skematis, konsep 3E dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar II.2

Konsep 3E



Sumber: Akuntansi Sektor Publik (Mardiasmo, 2002: 5)

- 1) Input merupakan sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan suatu kebijakan, program dan aktivitas.
- 2) Output merupakan hasil atau nilai tambah yang dicapai oleh kebijakan, program dan aktivitas.
- 3) Sasaran antara (*throughput*), analisis *value for money* (3E) memerlukan data input dan output yang memadai karena konsep 3E mempunyai kaitan erat dengan pengukuran output dan input. Sasaran antara dapat digunakan sebagai alat ukur jika data output yang sesungguhnya tidak tersedia.
- 4) Outcome adalah dampak yang ditimbulkan dari suatu aktivitas tertentu. Penetapan dan pengukuran terhadap outcome sering kali lebih sulit dibanding penetapan dan pengukuran terhadap input maupun output.

Konsep 3E dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan biaya input paling kecil untuk mencapai output yang optimum dalam

rangka mencapai tujuan organisasi. Implementasi konsep 3E diyakini dapat memperbaiki akuntabilitas sektor publik dan memperbaiki kinerja sektor publik.

b. Manfaat Konsep 3E

Konsep 3E sangat penting bagi pemerintah sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat karena pemakaian konsep tersebut akan memberikan manfaat berupa (Halim dalam Mahsun, 2006: 186):

- 1) Meningkatkan efektivitas pelayan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran.
- 2) Meningkatkan Mutu Pelayanan Publik.
- 3) Menurunkan biaya pelayanan publik karena efisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input.
- 4) Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik.
- 5) Meningkatkan kesadaran akan uang publik sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.

9. Teknik Pengukuran Kinerja

Menurut Mahsun (2006: 181), adapun metode yang digunakan dalam pengukuran kinerja salah satunya dengan menggunakan konsep 3E.

a. Ekonomis

Ekonomis (hemat) sering disebut kehematan yang mencakup juga pengelolaan secara berhati- hati atau cermat (*prudency*) dan tidak ada pemborosan.suatu kegiatan operasional dikatakan ekonomis bila dapat

menghilangkan atau mengurangi biaya yang tak perlu. Berikut formula untuk mengukur tingkat ekonomi:

Tingkat Ekonomi:

$$\frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100\%$$

Kriteria ekonomi adalah:

- 1) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti ekonomis.
- 2) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti ekonomis berimbang.
- 3) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti tidak ekonomis

b. Efisiensi

Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi (berdaya guna) dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan dengan input yang digunakan (*cash of output*). Proses kegiatan operasional ini dapat dikatakan efisien apabila produk yang dihasilkan atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya dan dana serendah-rendahnya (*speding well*). Berikut formula untuk mengukur tingkat efisiensi:

Tingkat efisiensi:

$$\frac{\text{Realisasi Biaya untuk memperoleh Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Kriteria efisiensi adalah:

- 1) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti efisien.

- 2) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti efisiensi berimbang.
- 3) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti tidak efisien.

c. Efektivitas

Efektivitas berhubungan dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Berikut formula untuk mengukur tingkat efektivitas.

Tingkat Efektivitas:

$$\frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Kriteria efektivitas adalah:

- 1) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti tidak efektif.
- 2) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti efektivitas berimbang.
- 3) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti efektif.

10. Anggaran Sektor Publik

Menurut Gade (2002: 41) menyatakan bahwa anggaran adalah rencana operasional keuangan yang mencakup suatu estimasi pengeluaran untuk jangka waktu tertentu dan rencana penerimaan pendapatan untuk membiayainya.

Menurut Mardiasmo (2003: 62) menyatakan anggaran publik berisikan rencana kegiatan yang dipersentasikan dalam bentuk rencana

kegiatan, rencanaperolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter dan berisi estimasi mengenai apa yang hendak dicapai atau dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang atau secara singkat dapat dinyatakan bahwa anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan:

- a. Berapa biaya atas rencana yang dibuat (pengeluaran atau pendapatan).
- b. Berapa banyak dan bagaimana cara memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut.

Dari pengertian diatas terlihat jelas bahwa pada anggaran (pemerintah) didahulukan pengeluaran baru mencari penerimaan, hal ini berbeda dengan anggaran pada perusahaan justru sebaliknya mendahulukan sumber- sumber pendapatan baru kemudian merencanakan pengeluaran. Perbedaan ini dikarenakan pada organisasi yang tidak mencari laba seperti pemerintah lebih mengutamakan pemakaian dana untuk kepentingan jalannya pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat, walaupun segi efisiensi masih tetap diperhitungkan. Sedangkan bagi perusahaan tujuan utamanya adalah mencari laba maka pemakaian laba harus benar- benar diperhitungkan untung ruginya sehingga pendapatan diharapkan sebanyak- banyaknya dan pengeluaran seefisiensi mungkin dengan harapan akan mendatangkan keuntungan.

11. Belanja

Peraturan pemerintah No. 58 tahun 2005, belanja adalah semua pengeluaran rutin dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran.

12. Anggaran

Menurut *Governmental Accounting Standarts Board* (GASB), anggaran merupakan rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayai dalam periode waktu tertentu.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2004: 11) jenis penelitian berdasarkan eksplanasinya antara lain:

1. Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variabel mandiri baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau hubungan dengan variabel lainnya

2. Penelitian Komparatif

Adalah penelitian yang bersifat membandingkan yang variabelnya masih sama dengan penelitian variabel yang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda.

3. Penelitian Asosiatif

Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antar dua variabel atau lebih.

Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan berdasarkan tingkat eksplanasinya yaitu jenis penelitian deskriptif atau suatu penelitian yang sifatnya menjelaskan yaitu menjelaskan kinerja atas pelaksanaan anggaran belanja Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi tempat penelitian adalah kantor Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim yang beralamat di jalan Jendral. A. Yani. No. 20 Muara Enim.

C. Operasional Variabel

Suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan bagaimana variabel atau kegiatan tersebut.

Tabel III.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Defenisi	Indikator
Aggaran Belanja Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim	Suatu rencana kerja yang dibuat dan digunakan oleh Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim yang memuat informasi mengenai pendapatan, dan belanja.	- Anggaran belanja dan realisasi periode 2010- 2012
Pengukuran kinerja dengan <i>Value For Money</i>	Suatu proses penilaian yang dilakukan untuk menilai kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya melalui alat ukur yang berdasarkan tingkat ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.	Konsep 3E: a. Ekonomis % perbandingan reali Sasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran <100% b. Efisiensi %perbandingan reali Sasi anggaran untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan <100% c. Efektivitas %perbandingan realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan >100%

Sumber: Penulis, 2014

D. Data yang diperlukan

Menurut Umar (2005: 45) sumber data penelitian terdiri dari:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber penelitian diperoleh peneliti secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).

2. Data Skunder

Data skunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat pihak lain).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder dan data primer. Data skunder yaitu berupa Data Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim tahun 2010-2012. Sedangkan data primer yaitu berupa penjelasan langsung dari kasubag keuangan tentang anggaran belanja Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Nanlin Alih Bahasa W. Gulo (2002: 122- 124) menyatakan bahwa teknik pengumpulan data adalah:

1. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari buku referensi- referensi

3. Survei

Survei adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan instrumen pertanyaan untuk meminta tanggapan dari responden tentang sampel.

4. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden

5. Kuesioner (angket)

Kuesioner adalah melalui media atau daftar pertanyaan yang dikirim secara langsung kepada responden

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi yaitu dengan cara menfotocopy dokumen- dokumen anggaran belanja. Wawancara yaitu dengan cara berkomunikasi secara langsung dengan pihak yang berwenang.

F. Analisis Data dan Teknik Analisis

1. Analisis Data

Menurut Hasan (2003: 32), Menyatakan bahwa analisis data dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif adalah analisis yang tidak dapat dinyatakan dalam angka- angka dan dapat merupakan jawaban dari suatu peristiwa yang sulit diukur

b. Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif adalah analisis yang dapat dinyatakan dalam angka- angka dan data dihitung dengan rumus statistik.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu yang digunakan untuk pengukuran kinerja atas pelaksanaan anggaran belanja dengan menggunakan metode *value for money* pada Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim.

2. Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan menyajikan angka, tabel dan uraian penjelasan pengukuran kinerja atas pelaksanaan anggaran belanja dengan menggunakan metode *value for money* pada Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim

Pada gambaran umum Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim ini, terlebih dahulu akan menjabarkan sejarah singkat berikut struktur organisasi yang menguraikan tugas dan fungsi bagian- bagian yang ada didalamnya, sehingga akan memberikan gambaran yang menyeluruh tentang kegiatan yang sedang diteliti serta mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan wewenang dan tanggung jawab Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim. Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim yang beralamat di jalan Jendral. A. Yani. No. 20 Muara Enim.

2. Visi dan Misi Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim

a. Visi

“ Mewujudkan sarana dan prasarana jalan yang handal, efektif dan efisien berwawasan lingkungan dan berkelanjutan ”.

b. Misi

1. Mewujudkan pelayanan umum dibidang kebinamargaan yang berkualitas.
2. Meningkatkan SDM di lingkungan Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim yang berkualitas.

3. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan, pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan.
4. Meningkatkan peran swasta dalam pembangunan kebinamargaan.
5. Meningkatkan mutu pengawasan pelaksanaan pekerjaan.

3. Struktur Organisasi

a. Susunan Organisasi

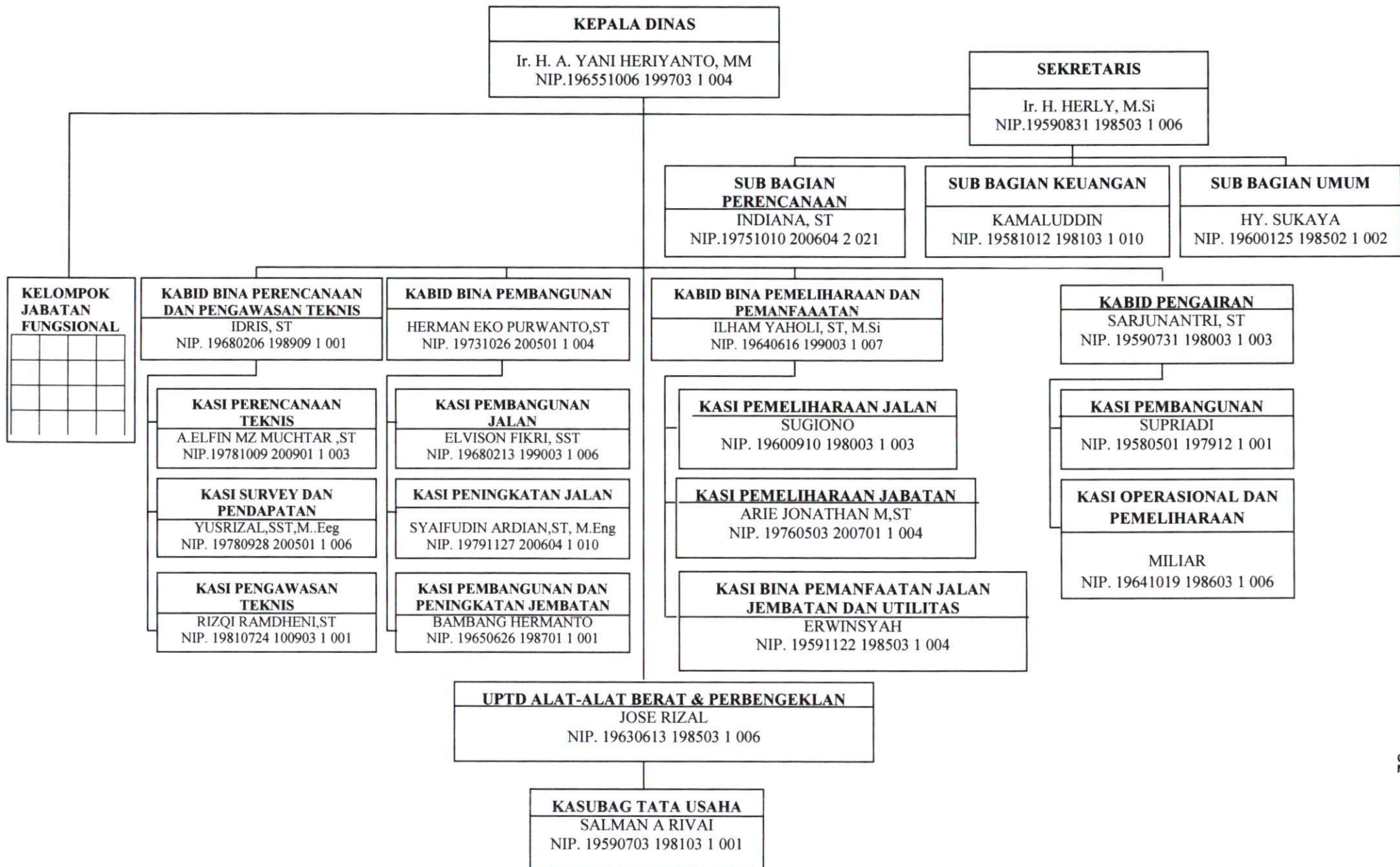
Susunan organisasi Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim ditetapkan dalam Keputusan Bupati dan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas daerah sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, maka dipandang perlu menyusun tugas pokok dan fungsi dinas daerah kabupaten muara enim.

Adapun susunan organisasi Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim terdiri dari:

- 1). Kepala Dinas
- 2) Sekretaris, membawahi:
 - a) Sub Bagian Perencanaan
 - b) Sub Bagian Keuangan
 - c) Sub Bagian Umum
- 3) Bidang Bina Pembangunan, membawahi:
 - a) Seksi Pembangun Jalan
 - b) Seksi Peningkatan Jalan

- c) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan
- 4) Bidang Pemeliharaan dan Pemanfaatan, membawahi:
- a) Seksi Pemeliharaan Jalan
 - b) Seksi Pemeliharaan Jembatan
 - c) Seksi Bina Pemanfaatan Jalan, Jembatan, dan Utilitas
- 5) Bidang Bina Perencanaan dan Pengawasan Teknis, membawahi:
- a) Seksi Perencanaan Teknis
 - b) Seksi Survey dan Pendataan
 - c) Seksi Pengawasan Teknis
- 6) Bidang Pengairan, membawahi:
- a) Seksi Pembangunan
 - b) Seksi Pemeliharaan dan Operasional

Susunan organisasi diatas tampak terlihat lebih jelas apabila diterangkan dalam bagan organisasi, sehingga akan memberikan penjelasan yang mudah mengenai organisasi yang bersangkutan. Adapun bagan susunan Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim:



b. Tugas dan Fungsi

Adapun uraian tugas dan fungsi dari masing- masing unit yang ada di Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim adalah sebagai berikut:

1) Kepala Dinas

Tugas :

Kepala Dinas PU. Bina Marga dan Pengairan membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah dibidang pekerjaan umum bina marga dan pengairan berdasarkan azaz otonomi dan tugas pembantuan.

Fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum bina marga dan pengairan.
- b) penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang pekerjaan umum bina marga dan pengairan.
- c) pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan dibidang pekerjaan umum bina marga dan pengairan.
- d) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pekerjaan umum bina marga dan pengairan.
- e) Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan, umum dan keuangan.
- f) Pelaksanaan pengawasan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang pekerjaan umum bina marga dan pengairan.

g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sekretariat

Tugas :

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi perencanaan, evaluasi, dan pelaporan program Dinas PU. Bina Marga dan Pengairan serta pengelolaan keuangan dan umum yang meliputi kegiatan kepegawaian, tata naskah dinas, kearsipan, pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, humas dan keprotokolan serta perjalanan dinas.

Fungsi :

- a) Penyiapan bahan koordinasi, pengolahan data dan penyusunan program kerja di lingkungan dinas.
- b) Penyiapan bahan administrasi, akuntansi, dan pelaporan keuangan.
- c) Pengelolaan administrasi kepegawaian.
- d) Pengelolaan perlengkapan, tata naskah dinas, kearsipan, rumah tangga, kehumasan, dan perjalanan dinas.
- e) Penyiapan bahan rencana kebutuhan, pengadaan dan pemeliharaan inventaris kantor.
- f) Penyiapan bahan fasilitasi advokasi dalam bidang bina marga dan pengairan.
- g) Penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan program

h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas PU. Bina Marga dan Pengairan.

3. Sub Bagian Umum

Tugas :

Sub bagian umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan pengelolaan tata usaha umum dan tata usaha kepegawaian.

Fungsi :

- a) Pengumpulan bahan, pengelolaan data dan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum.
- b) Pengurusan tata naskah dinas , kearsipan, perjalanan dinas dan humas serta rumah tangga di lingkungan dinas.
- c) Pengumpulan bahan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, dan pemeliharaan barang inventaris kantor dilingkungan dinas.
- d) Pengurusan administrasi kepegawaian dan pengumpulan bahan pembinaan disiplin pegawai di lingkungan dinas.
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

4. Sub Bagian Keuangan

Tugas :

Sub bagian keuangan mempunyai tugas melakukan kegiatan administrasi dan akuntansi keuangan.

Fungsi :

- a) Pengumpulan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan.

- b) Pengurusan surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar.
- c) Pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan.
- d) Pengurusan perhitungan anggaran di lingkungan dinas.
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

5. Sub Bagian Perencanaan

Tugas :

Sub bagian perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan penyusunan program bidang Bina Marga dan Pengairan serta melakukan evaluasi dan pelaporan.

Fungsi :

- a) Pengumpulan bahan , pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan.
- b) Pengumpulan bahan koordinasi perencanaan di lingkungan dinas.
- c) Pengumpulan bahan pengendalian dan monitoring perencanaan di lingkungan dinas.
- d) Pengumpulan bahan pelaksanaan administrasi, evaluasi, dan pelaporan program di lingkungan dinas
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

6. Bidang Bina Pembangunan

Tugas :

Bidang pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan bidang pembangunan jalan, peningkatan jalan dan jembatan.

Fungsi :

- a) Penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja bidang pembangunan jalan
- b) Penyiapan bahan dan pelaksanaan teknis di bidang pembangunan jalan.
- c) Penyiapan bahan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan, serta jembatan.
- d) Penyiapan bahan pelaksanaan dan penyusunan pengembangan jaringan jalan kabupaten, desa dan kota.
- e) Penyiapan bahan pelaksanaan pemutakhiran data dan penetapan peningkatan status fungsi jalan dan jembatan.
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Pengairan.

7. Seksi Pembangunan Jalan

Tugas :

Seksi pembangunan jalan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan pengelolaan kegiatan di bidang pembangunan jalan.

Fungsi :

- a) Pengumpulan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan seksi pembangunan jalan.
- b) Pengumpulan bahan dan pelaksanaan teknis di bidang pembangunan jalan.
- c) Pengumpulan bahan pelaksanaan pembangunan jalan

- d) Pengumpulan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya di bidang pembangunan jalan
- e) Pengumpulan bahan pelaksanaan pengawasan , evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan jalan
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang bina pembangunan

8. Seksi Peningkatan Jalan

Tugas :

Seksi peningkatan jalan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan pengelolaan kegiatan di bidang peningkatan jalan.

Fungsi :

- a) Pengumpulan bahan, pengelolaan data dan penyusunan rencana kegiatan seksi peningkatan jalan
- b) Pengumpulan bahan dan pelaksanaan teknis di bidang peningkatan jalan
- c) Pengumpulan bahan pelaksanaan peningkatan jalan
- d) Pengumpulan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya di bidang peningkatan jalan
- e) Pengumpulan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang peningkatan jalan
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang bina pembangunan

9. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan

Tugas :

Seksi pembangunan dan peningkatan jembatan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan pengelolaan kegiatan di bidang pembangunan dan peningkatan jembatan.

Fungsi :

- a) Penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja bidang pembangunan dan peningkatan jembatan
- b) Penyiapan bahan dan pelaksanaan teknis di bidang pembangunan dan peningkatan jembatan
- c) penyiapan bahan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jembatan
- d) Penyiapan bahan pelaksanaan dan penyusunan pengembangan jaringan jembatan kabupaten, desa dan kota
- e) Penyiapan bahan pelaksanaan pemutakhiran data dan penetapan peningkatan status fungsi jembatan.
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang bina pembangunan

10. Bidang Pemeliharaan dan Pemanfaatan

Tugas :

Bidang pemeliharaan dan pemanfaatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan bidang pemeliharaan dan pemanfaatan jalan dan jembatan.

Fungsi :

- a) Penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja bidang pemeliharaan dan pemanfaatan jalan dan jembatan
- b) Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis di bidang pemeliharaan dan pemanfaatan jalan dan jembatan
- c) Penyiapan bahan pelaksanaan pemeliharaan dan pemanfaatan jalan dan jembatan
- d) Penyiapan bahan pelaksanaan pemutakhiran data pemeliharaan dan pemanfaatan jalan dan jembatan
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan

11. Seksi Pemeliharaan Jalan

Tugas :

Seksi pemeliharaan jalan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan pengelolaan kegiatan di bidang pemeliharaan jalan

Fungsi :

- a) Pengumpulan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan seksi pemeliharaan jalan
- b) pengumpulan bahan dan pelaksanaan teknis di bidang pemeliharaan jalan
- c) pengumpulan bahan pelaksanaan identifikasi kondisi jalan
- d) Pengumpulan bahan pelaksanaan pemeliharaan jalan

- e) Pengumpulan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemeliharaan jalan
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pemeliharaan dan pemanfaatan.

12. Seksi Pemeliharaan Jembatan

Tugas :

Seksi pemeliharaan jembatan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan pengelolaan kegiatan di bidang pemeliharaan jembatan

Fungsi :

- a) Pengumpulan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan seksi pemeliharaan jembatan
- b) Pengumpulan bahan dan pelaksanaan teknis di bidang pemeliharaan jembatan
- c) Pengumpulan bahan pelaksanaan identifikasi kondisi jembatan
- d) Pengumpulan bahan pelaksanaan pemeliharaan jembatan
- e) Pengumpulan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemeliharaan jembatan
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pemeliharaan dan pemanfaatan

13. Seksi Bina Pemanfaatan Jalan, Jembatan, dan Utilitas

Tugas :

Seksi bina pemanfaatan jalan, jembatan, dan utilitas mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan pengelolaan kegiatan di bidang bina pemanfaatan jalan, jembatan, dan utilitas.

Fungsi :

- a) Pengumpulan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan seksi bina pemanfaatan jalan, jembatan, dan utilitas
- b) Pengumpulan bahan dan pelaksanaan teknis di bidang bina pemanfaatan jalan, jembatan, utilitas
- c) Pengumpulan bahan pelaksanaan identifikasi pemanfaatan jalan, jembatan, dan utilitas
- d) Pengumpulan bahan pelaksanaan bina pemanfaatan jalan, jembatan, dan utilitas
- e) Pengumpulan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan di bidang bina pemanfaatan jalan, jembatan, dan utilitas
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pemeliharaan dan pemanfaatan

14. Bidang Bina Perencanaan dan Pengawasan Teknis

Tugas :

Bidang bina perencanaan dan pengawasan teknis mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan bidang bina perencanaan dan pengawasan teknis

Fungsi :

- a) Penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja bidang bina perencanaan dan pengawasan teknis
- b) Penyiapan bahan dan pelaksanaan petunjuk teknis di bidang bina perencanaan dan pengawasan teknis
- c) Penyiapan bahan pengkajian pelaksanaan perencanaan dan pengawasan teknis
- d) Penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina perencanaan dan pengawasan teknis
- e) Penyiapan bahan pelaksanaan pemutakhiran data di bidang bina perencanaan dan pengawasan teknis
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan

15. Seksi Perencanaan Teknis

Tugas :

Seksi perencanaan teknis mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan pengelolaan kegiatan di bidang perencanaan teknis

Fungsi :

- a) Pengumpulan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan seksi perencanaan teknis
- b) Pengumpulan bahan dan pelaksanaan teknis di bidang perencanaan teknis

- c) Pengumpulan bahan pelaksanaan pembinaan di bidang perencanaan teknis
- d) Pengumpulan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan teknis
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Perencanaan dan Pengawasan Teknis

16. Seksi Survey dan Pendataan

Tugas :

Seksi survey dan pendataan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan pengelolaan kegiatan di bidang survey dan pendataan.

Fungsi :

- a) Pengumpulan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan seksi survey dan pendataan
- b) Pengumpulan bahan dan pelaksanaan teknis di bidang survey dan pendataan
- c) Pengumpulan bahan pelaksanaan pembinaan di bidang survey dan pendataan
- d) Pengumpulan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan di bidang survey dan pendataan
- e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Perencanaan dan Pengawasan Teknis

17. Seksi Pengawasan Teknis

Tugas :

Seksi pengawasan teknis mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan pengelolaan kegiatan di bidang pengawasan teknis.

Fungsi :

- a) Pengumpulan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan pengawasan teknis
- b) Pengumpulan bahan dan pelaksanaan teknis di bidang pengawasan teknis
- c) Pengumpulan bahan pelaksanaan pembinaan di bidang pengawasan teknis
- d) Pengumpulan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan teknis
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang bina perencanaan dan pengawasan teknis

18. Bidang Pengairan

Tugas :

Bidang pengairan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan bidang pengairan.

Fungsi :

- a) Penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja bidang pengairan
- b) Penyiapan bahan dan pelaksanaan teknis di bidang pengairan

- e) Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh kepala bidang pengairan

20. Seksi Pemeliharaan dan Operasional

Tugas :

Seksi pemeliharaan dan operasional mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan pengelolaan kegiatan di bidang seksi pemeliharaan dan operasional.

Fungsi :

- a) Pengumpulan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan seksi pemeliharaan dan operasional
- b) Pengumpulan bahan dan pelaksanaan teknis di bidang pemeliharaan dan operasional
- c) Pengumpulan bahan pelaksanaan pembinaan di bidang pemeliharaan dan operasioanl
- d) Pengumpulan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemeliharaan dan operasional
- e) Pelaksanaan tugas lain yang di berikan kepala bidang pengairan

21. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Barang Beredar

Tugas :

Seksi monitoring, evaluasi dan pelaporan barang beredar mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan pengelolaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan barang beredar.



Fungsi :

- a) Pengumpulan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana seksi monitoring, evaluasi dan pelaporan barang beredar
- b) Pengumpulan bahan dan pelaksanaan teknis di bidang monitoring, evaluasi dan pelaporan barang beredar
- c) Pengumpulan bahan dan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya di bidang monitoring, evaluasi dan pelaporan barang beredar
- d) Pengumpulan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang monitoring, evaluasi dan pelaporan barang beredar
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang perlindungan konsumen

Data anggaran Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim tahun 2010- 2012.

Tabel IV. 1
Anggaran dan Realisasi Belanja Pada Dinas PU. Bina Marga
Kabupaten Muara Enim
Tahun 2010- 2012

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang
Tahun 2010			
Belanja Pegawai	3.119.252.099	3.288.928.693	(169.676.594)
Belanja Barang dan Jasa	2.362.464.980	1.723.086.892	639.378.088
Belanja Modal	127.270.000.000	122.289.945.158	4.980.054.842
	132.751.717.079	127.301.960.743	5.789.109.524
Tahun 2011			
Belanja Pegawai	3.329.301.973	3.494.609.673	(165.307.700)
Belanja Barang dan Jasa	2.998.827.400	2.517.417.988	481.409.412
Belanja Modal	144.356.097.999	138.415.385.348	5.940.712.651
Total	150.684.227.372	144.424.413.009	6.584.429.763
Tahun 2012			
Belanja Pegawai	4.013.648.122	3.375.350.913	638.297.209
Belanja Barang dan Jasa	5.161.817.069	4.500.014.140	561.802.929
Belanja Modal	245.639.624.975	238.436.721.000	7.202.903.975
Total	254.815.090.166	246.312.086.053	8.403.004.113

Sumber : Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim, 2014

Tabel IV. 2
Anggaran dan Realisasi Pendapatan pada Dinas PU. Bina Marga
Kabupaten Muara Enim
Tahun 2010- 2012

Tahun	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang
2010	48.707.109	101.484.780	52.777.671
2011	50.162.060	82.709.480	32.547.420
2012	64.940.870	64.855.560	85.310
Total	163.810.039	249.049.820	85.410.401

Sumber: Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim, 2014

Tabel IV. 3
Rincian Realisasi Biaya Operasional pada Dinas PU. Bina Marga
Kabupaten Muara Enim
Tahun 2010- 2012

Tahun	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
2010	186.775.980	95.898.230	90.877.750
2011	197.830.300	121.475.800	76.354.500
2012	465.740.300	461.040.300	4.700.000
Total	580.346.580	678.414.330	171.932.250

Sumber: Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim, 2014

B. Pembahasan

Secara garis besar dibahas pada bab ini yaitu menganalisis kinerja pelaksanaan anggaran belanja Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim dengan menggunakan metode *value for money*. Ketiga pokok bahasan dalam *value for money* yaitu ekonomis, efisiensi, efektivitas sangat terkait satu dengan lainnya. Perhitungan ini disajikan sebagai berikut:

1. Pengukuran Ekonomis

Ekonomis (kehematan) sebagai tingkat biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan suatu kegiatan atau memperoleh sesuatu. Untuk mengukur tingkat ekonomis dalam pengelolaan keuangan yaitu dengan melihat perbandingan antara anggaran belanja dengan realisasinya dengan persentase pencapaiannya.

Indikator tingkat ekonomis adalah:

a. Realisasi Pengeluaran

Realisasi pengeluaran adalah suatu tingkat pencapaian yang dilakukan oleh Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim berupa aktivitas- aktivitas pembelian barang atau jasa dan pembayarannya.

b. Anggaran Pengeluaran

Anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya kedalam kebutuhan- kebutuhan yang tidak terbatas. Anggaran pengeluaran merupakan seberapa besar penerimaan yang akan diterima terhadap pengeluaran atau biaya yang akan dikeluarkan untuk aktivitas organisasi terutama dalam belanja modal.

Dalam pengukuran kinerja Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim ini. Tolak ukur yang digunakan atau sesuai dengan indikator ekonomis ini adalah realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran dibagi lalu dikali seratus persen.

Tingkat Ekonomis:

$$\frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100 \%$$

Melalui formula diatas dapat dilakukan analisis tingkat ekonomi anggaran dan realisasi belanja Dinas PU. Bina Marga setiap tahunnya, sebagai berikut:

a. Tahun 2010

1) Belanja Pegawai

Anggaran belanja pegawai pada Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim pada tahun 2010 anggaran sebesar Rp. 3.119.252.099 dan realisasinya sebesar Rp. 3.288.928.693, maka rasio tingkat ekonomisnya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Tingkat Ekonomi} &= \frac{\text{Rp } 3.288.928.693}{\text{Rp } 3.119.252.099} \times 100\% \\ &= 105,44\%\end{aligned}$$

2) Belanja Barang dan Jasa

Anggaran belanja barang dan jasa pada Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim pada tahun 2010 anggaran sebesar Rp 2.362.464.980 dan realisasinya sebesar Rp 1.723.086.892, maka rasio tingkat ekonomisnya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Tingkat Ekonomi} &= \frac{\text{Rp } 1.723.086.892}{\text{Rp } 2.363.464.980} \times 100\% \\ &= 72,91\%\end{aligned}$$

3) Belanja Modal

Anggaran belanja modal pada Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim pada tahun 2010 anggaran sebesar Rp 127.270.000.000 dan realisasinya sebesar Rp 122.289.945.158, maka rasio tingkat ekonomisnya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Tingkat Ekonomi} &= \frac{\text{Rp } 122.289.945.158}{\text{Rp } 127.270.000.000} \times 100\% \\ &= 96,08\%\end{aligned}$$

Artinya pada tahun 2010 tingkat realisasi pengeluaran anggaran belanja pegawai adalah 105,44%, anggaran belanja barang dan jasa adalah 72,91%, anggaran belanja modal adalah 96,08%. Berdasarkan kriteria diatas belanja pegawai melebihi dari yang dianggarkan, jika diperoleh nilai lebih dari 100% dari tingkat ekonomi berarti pengukuran kinerja pada tahun 2010

untuk belanja pegawai adalah tidak ekonomis, sedangkan untuk belanja barang dan jasa serta belanja modal ekonomis.

b. Tahun 2011

1) Belanja Pegawai

Anggaran belanja pegawai pada Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim pada tahun 2011 anggaran sebesar Rp 3.329.301.973 dan realisasinya sebesar Rp 3.494.609.673, maka rasio tingkat ekonomisnya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Ekonomi} &= \frac{\text{Rp } 3.494.609.673}{\text{Rp } 3.329.301.973} \times 100\% \\ &= 104,96\% \end{aligned}$$

2) Belanja Barang dan Jasa

Anggaran belanja barang dan jasa pada Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim pada tahun 2011 sebesar Rp 2.998.827.400 dan realisasinya sebesar Rp 2.517.417.988, maka rasio tingkat ekonomisnya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Ekonomi} &= \frac{\text{Rp } 2.517.417.988}{\text{Rp } 2.998.827.400} \times 100\% \\ &= 83,95\% \end{aligned}$$

3) Belanja Modal

Anggaran belanja modal pada Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim pada tahun 2011 sebesar Rp 144.356.097.999 dan realisasinya sebesar Rp 138.415.385.348, maka rasio tingkat ekonomisnya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Tingkat Ekonomi} &= \frac{\text{Rp } 138.415.385.348}{\text{Rp } 144.356.097.999} \times 100\% \\ &= 95,88\%\end{aligned}$$

Artinya pada tahun 2011 tingkat realisasi pengeluaran anggaran belanja pegawai adalah 104,96%, anggaran belanja barang dan jasa adalah 83,95%, anggaran belanja modal adalah 95,88%. Berdasarkan kriteria diatas belanja pegawai melebihi dari yang dianggarkan, jika diperoleh nilai lebih dari 100% dari tingkat ekonomi berarti pengukuran kinerja pada tahun 2011 untuk belanja pegawai adalah tidak ekonomis, sedangkan untuk belanja barang dan jasa serta belanja modal ekonomis.

c. Tahun 2012

1) Belanja Pegawai

Anggaran belanja pegawai pada Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim pada tahun 2012 sebesar Rp 4.013.648.122 dan realisasinya sebesar Rp 3.375.350.913, maka rasio tingkat ekonomisnya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Tingkat Ekonomi} &= \frac{\text{Rp } 3.375.350.913}{\text{Rp } 4.013.648.122} \times 100\% \\ &= 84,09\%\end{aligned}$$

2) Belanja Barang dan Jasa

Anggaran belanja barang dan jasa Pada Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim pada tahun 2012 sebesar Rp 5.161.817.069 dan realisasinya sebesar Rp 3.375.350.913, maka rasio tingkat ekonomisnya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Ekonomi} &= \frac{\text{Rp } 3.375.350.913}{\text{Rp } 5.161.817.069} \times 100\% \\ &= 65,39\% \end{aligned}$$

3) Belanja Modal

Anggaran belanja modal pada Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim pada tahun 2012 sebesar Rp 245.639.624.975 dan realisasinya sebesar Rp 238.436.721.000, maka rasio tingkat ekonomisnya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Ekonomi} &= \frac{\text{Rp } 238.436.721.000}{\text{Rp } 245.639.624.975} \times 100\% \\ &= 97,06\% \end{aligned}$$

Artinya pada tahun 2012 tingkat realisasi pengeluaran anggaran belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal dari target yang ditetapkan adalah 84,09%, 65,39%, 97,06%. Berdasarkan kriteria di atas jika diperoleh nilai kurang 100% dari tingkat ekonomis berarti pengukuran kinerja tahun 2012 adalah ekonomis.

Tabel IV. 4

Hasil Perhitungan Tingkat Ekonomis

Uraian	Hasil % Pencapaian	Keterangan	Standar Keterangan
Tahun 2010			
Belanja Pegawai	105,44%	Tidak Ekonomis	($x > 100\%$)
Belanja Barang dan Jasa	72,91%	Ekonomis	($x < 100\%$)
Belanja Modal	96,08%	Ekonomis	($x < 100\%$)
Tahun 2011			
Belanja Pegawai	104,96%	Tidak Ekonomis	($x > 100\%$)
Belanja Barang dan Jasa	83,95%	Ekonomis	($x < 100\%$)
Belanja Modal	95,88%	Ekonomis	($x < 100\%$)
Tahun 2012			
Belanja Pegawai	84,09%	Ekonomis	($x < 100\%$)
Belanja Barang dan Jasa	65,39%	Ekonomis	($x < 100\%$)
Belanja Modal	97,06%	Ekonomis	($x < 100\%$)

Sumber: Penulis, 2014

Berdasarkan tingkat ekonomi realisasi pengeluaran tahun 2010 yaitu belanja pegawai 105,44%, berarti tidak ekonomis, belanja barang dan jasa sebesar 72,91% berarti ekonomis, begitu pula belanja modal yang tingkat pencapaiannya sebesar 96,08% sudah ekonomis. Pada tahun 2011 belanja pegawai sebesar 104,96% berarti tidak ekonomis, belanja barang dan jasa 83,95% ekonomis, belanja modal sebesar 95,88% juga telah ekonomis, sedangkan pada tahun 2012 belanja pegawai sebesar 84,09%, belanja barang dan jasa sebesar 65,39%, dan belanja modal sebesar 97,06% telah bejalan ekonomis. Berarti Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim dalam realisasi pengeluaran tahun 2010 dan 2011 untuk belanja pegawai tidak ekonomis karena realisasinya melebihi 100%, sedangkan tahun 2011 ekonomis karena realisasinya kurang dari 100% dan belanja barang dan jasa

serta belanja modal dari tahun 2010- 2012 kinerjanya sangat ekonomis karena realisasinya kurang dari 100%.

Hal yang menyebabkan tidak tercapainya tingkat ekonomis khususnya pada anggaran belanja pegawai berdasarkan penjelasan dari bagian keuangan Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim karena adanya penambahan pegawai pada saat tahun berjalan.

2. Pengukuran Efisiensi

Efisiensi (daya guna) berhubungan dengan pengukuran seberapa besar cara yang digunakan untuk membandingkan antara output yang dihasilkan dengan input yang digunakan (*cost of output*). Suatu kegiatan operasional dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah- rendahnya (*spending well*).

Pengukuran kinerja Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim ini, tolak ukur yang digunakan atau sesuai dengan indikator efisiensi ini adalah membandingkan realisasi belanja operasional dengan realisasi pendapatan dikalikan 100%.

Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim dalam hal ini untuk memperoleh pendapatan harus mengeluarkan biaya yang digunakan untuk berbagai kegiatan dalam suatu periode tertentu.

Tingkat Efisiensi:

$$\frac{\text{Realisasi Biaya untuk memperoleh pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Melalui formula diatas dapat dilakukan analisis tingkat efisiensi anggaran belanja Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim adalah sebagai berikut:

a. Tahun 2010

Realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan pada Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim pada tahu 2010 ditetapkan sebesar Rp 95.898.230 dan anggaran pendapatan Rp 48.707.109, maka rasio efisiensinya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Efisiensi} &= \frac{\text{Rp } 95.898.230}{\text{Rp } 48.707.109} \times 100\% \\ &= 196,89\% \end{aligned}$$

Artinya pada tahun 2010 tingkat pencapaian realisasi pengeluaran dan pendapatan dari target yang ditetapkan adalah sebesar 196,89%, berdasarkan kriteria diatas diperoleh nilai lebih dari 100% dari tingkat efisiensi berarti pengukuran kinerja tahun 2010 tidak efisien.

b. Tahun 2011

Realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan pada Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim pada tahu 2011 ditetapkan sebesar Rp 121.475.800 dan anggaran pendapatan Rp50.162.060, maka rasio efisiensinya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Efisiensi} &= \frac{\text{Rp } 121.475.800}{\text{Rp } 50.162.060} \times 100\% \\ &= 242,17\% \end{aligned}$$

Artinya pada tahun 2011 tingkat pencapaian realisasi pengeluaran dan pendapatan dari target yang ditetapkan adalah sebesar 242,17%, berdasarkan kriteria diatas diperoleh nilai lebih dari 100% dari tingkat efisiensi berarti pengukuran kinerja tahun 2011 tidak efisien.

c. Tahun 2012

Realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan pada Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim pada tahun 2012 ditetapkan sebesar Rp 461.040.300 dan anggaran pendapatan Rp 64.940.870, maka rasio efisiensinya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Efisiensi} &= \frac{\text{Rp } 461.040.300}{\text{Rp } 64.940.870} \times 100\% \\ &= 709,94\% \end{aligned}$$

Artinya pada tahun 2012 tingkat pencapaian realisasi pengeluaran dan pendapatan dari target yang ditetapkan adalah sebesar 796,01%, berdasarkan kriteria diatas diperoleh nilai lebih dari 100% dari tingkat efisiensi berarti pengukuran kinerja tahun 2012 tidak efisien.

Tabel IV.5

Hasil Perhitungan Tingkat Efisiensi

Tahun	Hasil % Pencapaian	Keterangan	Standar Keterangan
2010	196,89%	Tidak Efisien	(x> 100%)
2011	242,17%	Tidak Efisien	(x>100%)
2012	709,94%	Tidak Efisien	(x>100%)

Besarnya tingkat efisiensi Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim berdasarkan persentasenya pada tahun 2010 adalah sebesar 196,89%,

tahun 2011 adalah sebesar 242,17%, tahun 2012 adalah sebesar 709,94%. Jadi berdasarkan persentase diatas selama tiga tahun kinerja Dinas PU. Bina Marga tidak efisien karena realisasinya melebihi dari 100%.

Hal yang menyebabkan tidak tercapainya tingkat efisiensi adalah terjadinya pemborosan penganggaran anggaran biaya operasional alat- alat berat untuk memperoleh pendapatan.

3. Pengukuran Efektivitas

Efektivitas (hasil guna) adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam usaha mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan perbandingan *income* dan *output*, untuk mengukur tingkat efektivitas dalam pengelolaan keuangan dengan melihat perbandingan anggaran pendapatan dengan realisasi dan persentase tingkat pencapaiannya.

Formula Efektivitas:

$$\text{Tingkat Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

a. Tahun 2010

Anggaran pendapatan Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim pada tahun 2010 ditetapkan sebesar Rp 48.707.109, dan realisasinya sebesar Rp. 101.484.780, maka rasio efektivitasnya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Efektivitas} &= \frac{\text{Rp } 101.484.780}{\text{Rp. } 48.707.109} \times 100\% \\ &= 208,36\% \end{aligned}$$

b. Tahun 2011

Anggaran pendapatan Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim pada tahun 2011 ditetapkan sebesar Rp 50.162.060, dan realisasinya sebesar Rp. 82.709.480, maka rasio efektivitasnya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Efektivitas} &= \frac{\text{Rp } 82.709.480}{\text{Rp. } 50.162.060} \times 100\% \\ &= 164,88\% \end{aligned}$$

c. Tahun 2012

Anggaran pendapatan Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim pada tahun 2012 ditetapkan sebesar Rp 64.940.870, dan realisasinya sebesar Rp. 64.855.560, maka rasio efektivitasnya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Efektivitas} &= \frac{\text{Rp } 64.855.560}{\text{Rp. } 64.940.870} \times 100\% \\ &= 99,87\% \end{aligned}$$

Tabel IV.6

Hasil Perhitungan Tingkat Efektivitas

Tahun	Hasil % Pencapaian	Keterangan	Standar Keterangan
2010	208,36%	Efektif	(x> 100%)
2011	164,88%	Efektif	(x>100%)
2012	99,87%	Tidak Efektif	(x<100%)

Berdasarkan kriteria efektivitas apabila pendapatan diatas 100% itu efektif sedangkan jika tidak mencapai 100% tidak efektif. melihat persentase diatas tingkat pendapatan Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim pada tahun 2010 – 2011 efektif karena persentasenya mencapai 100% sedangkan pada tahun 2012 tingkat pendapatannya tidak efektif karena persentasenya di bawah 100%.

Hal yang menyebabkan tidak tercapainya tingkat efektivitas adalah dikarenakan kondisi alat- alat berat yang ada kurang baik

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat di simpulkan bahwa kinerja Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim dalam hal anggaran belanja tahun 2010- 2012 bila di ukur dengan metode 3E (*value for money*) belum maksimal atau kurang baik, hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran kinerja sebagai berikut:

1. Ekonomis

Berdasarkan tingkat ekonomis realisasi pengeluaran anggaran belanja pegawai tahun 2010 adalah sebesar 105,44%, belanja barang dan jasa sebesar 72,91% dan belanja modal sebesar 96,08%, pada tahun 2011 tingkat ekonomi realisasi pengeluaran anggaran belanja pegawai adalah sebesar 104,96%, belanja barang dan jasa sebesar 83,95%, dan belanja modal sebesar 95,88%, sedangkan tahun 2012 tingkat ekonomi realisasi pengeluaran anggaran belanja pegawai adalah sebesar 84,09%, belanja barang dan jasa adalah sebesar 65,39% dan belanja modal adalah sebesar 97,06%. Ini berarti menunjukkan bahwa Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim dalam melakukan pengeluaran belanja pegawai tahun 2010 dan 2012 tidak ekonomis karena berdasarkan kriteria yang diperoleh tingkat pencapaian lebih dari 100%, sementara pada tahun 2012 pengeluaran

belanja pegawai ekonomis karena realisasi pengeluaran dibawah 100% tidak melebihi anggaran yang ditentukan.

Hal yang menyebabkan terjadinya ketidak ekonomisan dikarenakan adanya penambahan pegawai pada saat tahun berjalan

2. Efisiensi

Berdasarkan tingkat efisiensi realisasi pengeluaran dan pendapatan pada tahun 2010 sebesar 196,89%, pada tahun 2011 tingkat efisiensi realisasi pengeluaran dan pendapatan adalah 242,17%, sedangkan tahun 2012 tingkat efisiensi realisasi pengeluaran dan pendapatan adalah sebesar 709,94%, berarti Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim dalam melakukan pengeluaran untuk memperoleh pendapatan pada tahun 2010-2012 tidak efisien karena hasil yang dicapai lebih dari 100%.

Hal yang menyebabkan tidak tercapainya tingkat efisiensi dikarenakan terjadinya pemborosan penganggaran biaya operasional alat- alat berat untuk memperoleh pendapatan.

3. Efektivitas

Berdasarkan dari hasil perhitungan tahun 2010 sebesar 208,36%, tahun 2011 adalah sebesar 164,88%, tahun 2012 sebesar 99,87%. Dilihat dari hasil tersebut pada tahun 2010 dan 2011 kinerja Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim efektif karena hasil yang dicapai lebih dari 100%, sedangkan pada tahun 2012 kinerjanya tidak efektif karena hasil yang dicapai kurang dari 100%.

Hal yang menyebabkan tidak tercapainya tingkat efektivitas dikarenakan kondisi alat- alat berat yang ada kurang baik.

B. SARAN

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, ada beberapa hal yang mungkin dapat digunakan pihak manajemen kantor Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan arah dan kebijakan instansi dalam jangka panjang yaitu:

1. Dari Aspek Ekonomis

Hendaknya Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim dapat lebih mengoptimalkan pegawai yang sudah ada dan tidak perlu menambah pegawai sehingga pembebanan anggaran belanja pegawai akan lebih ekonomis

2. Dari Aspek Efisiensi

Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim lebih selektif membuat perencanaan anggaran dan pendapatan belanja dengan cara menerapkan metode *value for money*

3. Dari Aspek Efektivitas

Hendaknya Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Muara Enim dapat mengganti dengan alat- alat berat yang baru sehingga tingkat efektivitas dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2001. **Akuntansi Sektor Publik**: Fakultas Ekonomi UGM: Yogyakarta
- Bastian, Indra. 2006. **Akuntansi Sektor Publik**: Suatu Pengantar. Erlangga: Jakarta.
- M. Iqbal Hasan 2003. **Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis**. Salemba Empat: Jakarta.
- Nanlin Alih Bahasa W. Gulo. 2002. **Metodologi Penelitian**. PT. Gramedia Widiasarna Indonesia: Jakarta.
- Muhammad Mahsun. 2006. **Pengukuran Kinerja Sektor Publik**. BPFE Yogyakarta: Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. **Akuntansi Sektor Publik**. Edisi Pertama. BPFE Yogyakarta: Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005. Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Sugiyono. 2004. **Metodologi Penelitian Akuntansi**. Erlangga: Yogyakarta.
- Tri Siswi Nugrahani. 2007. Analisis Penerapan *Konsep Value For Money* Pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. **Jurnal Akuntansi**, Vol 1, NO 2, 2013.
- Annisa, Dian. 2011. Evaluasi Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Kota Makasar. **Jurnal Akuntansi**.

PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
DINAS PU BINA MARGA DAN PENGAIRAN

Jl. Jend. A. Yani No. 20 Telp. (0734) 421099 Fax. 422226 Muara Enim 31311
E-mail : kbmp@muaraenim.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 600/271 /BMP/ME/2014

ertanda Tangan di Bawah ini :

: KAMALUDDIN
: 19581012 198103 1 010
: Kasubag Keuangan Dinas PU Bina Marga dan Pengairan
Kabupaten Muara Enim

ngkan Bahwa :

: MUCHAMAD RIZKI
: 22 2010 135
: Ekonomi Akutansi
: Muhamadiyah Palembang

elaksanakan pengambilan data pada Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Muara Enim

nikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Muara Enim, 27 Maret 2014

**A.n KEPALA DINAS PU BINA MARGA
DAN PENGAIRAN
KABUPATEN MUARA ENIM
Kasubag Keuangan**



KAMALUDDIN
NIP. 19581012 198103 1 010



KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

MAHASISWA : MUCHAMAD RIZKI

PEMBIMBING

NPM : 22.2010.135

KETUA : MIRAN, S.E., M.Si, AK

FAKULTAS : AKUNTANSI

ANGGOTA :

JUDUL SKRIPSI : PENGUKURAN KINERJA ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA DINAS PU. BINA MARGA KABUPATEN MUARA ENIM DENGAN MENGGUNAKAN METODE VALUE FOR MONEY

NO.	TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1	20/4	Perbaiki Bab I & 2			Perbaikan
2	5/5	Perbaiki Bab IV			Perbaikan
3	16/6	ACC SKRIPSI			ACC skripsi
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

CATATAN :

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan skripsi, 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di : Palembang
 Pada tanggal : 16 / 06 / 2014
 a.n. Dekan

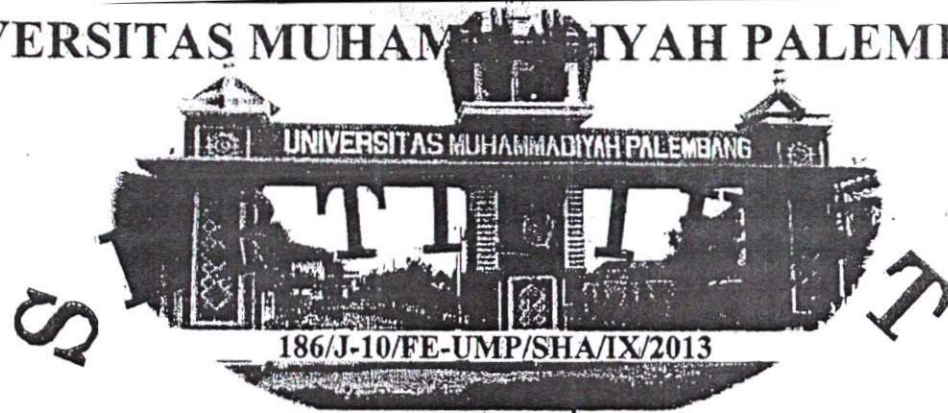
 Ketua Jurusan
 Rosalina Ghazali, S.E., Ak., M.Si

JADWAL PENELITIAN

Keterangan	Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Survei Pendahuluan	■	■	■																					
Laporan Survei Pendahuluan				■	■	■	■																	
Proposal								■	■	■	■													
Seminar Proposal											■													
Revisi Seminar												■												
Pengambilan Data													■	■	■									
Pengolahan Data Analisis															■	■	■	■	■					
Hasil Penelitian																			■	■				
Penggandaan Penelitian																				■				
Ujian Komprehensif																					■	■	■	



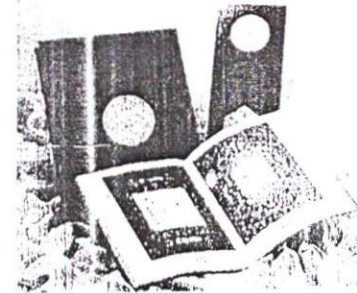
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA : MUCHAMAD RIZKI
NIM : 222010135
JURUSAN : Akuntansi



Yang dinyatakan **LULUS** Membaca dan Hafalan Al - Qur'an
di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang
Dengan Predikat **MEMUASKAN**

Palembang, 25 September 2013

an. Dekan

Wakil Dekan IV

Drs. Antoni, M.H.I.



SURAT KETERANGAN TELAH MENGIKUTI TES TOEFL

dengan akan dilaksanakannya ujian Komprehensif di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Univeristas ah Palembang, maka mahasiswa dengan nama dibawah ini telah mengikuti Tes TOEFL, untuk di sementara mendaftarkan pada ujian tersebut, yaitu :

NO	NAME	STUDENT NUMBER
1	Muchamad Rizki	22 2010 135

erangan Ini di Laporkan ASLI,

eh difotocopy dan hanya berlaku sampai dengan **31 AGUSTUS 2014**



Palembang, 15 Juli 2014

Dekan

Wakil Dekan I

[Signature]
Drs. Sunardi, SE, M.Si

NIDN : 0206046303



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
~~STATUS DISAMAKAN / TERAKREDITASI~~

PIAGAM

No.392/H-4/PPKKN/UMP/IIX/2014

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palembang menerangkan bahwa :

Nama : Muchamad Rizki
Nomor Pokok Mahasiswa : 22 2010 135
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi
Tempat Tgl. Lahir : Muara Enim, 10-04-1993

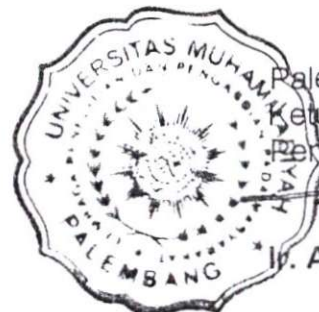
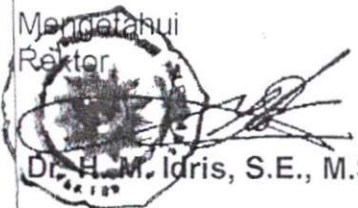
Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata Tematik Posdaya Angkatan ke-6 yang dilaksanakan dari tanggal 23 Januari sampai dengan 06 Maret 2014 bertempat di:

Kelurahan/Desa : Tanjung Muning
Kecamatan : Gunung Megang
Kota/Kabupaten : Muara Enim
Dengan Nilai : (A)



Mendatuhui
Rektor

Dr. H. M. Idris, S.E., M.Si.



Palembang, 28 Maret 2014
Ketua Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat

Iq. Alhanannasir, M.Si.

BIODATA PENULIS

NAMA : MUCHAMAD RIZKI

TEMPAT/TANGGAL LAHIR : MUARA ENIM, 10 APRIL 1993

JENIS KELAMIN : LAKI- LAKI

ALAMAT : JL. BAMBANG UTOYO GG. NURI NO 103
KABUPATEN MUARA ENIM (BELAKANG
POLRES MUARA ENIM)

PEKERJAAN : MAHASISWA

NO. TELP : -

NAMA ORANG TUA

1. AYAH : KAMALUDDIN

2. IBU : IDA YUHARTINI

PEKERJAAN ORANG TUA

1. AYAH : PNS

2. IBU : IBU RUMAH TANGGA

ALAMAT ORANG TUA : JL. BAMBANG UTOYO GG. NURI NO. 103
KABUPATEN MUARA ENIM (BELAKANG
POLRES MUARA ENIM)

PENULIS

MUCHAMAD RIZKI